

## **ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET DI DINAS PERHUBUNGAN MANADO**

*ANALYSIS SYSTEM AND PROCEDURE ACCOUNTANCY ASSET IN MANADO CITY  
OFFICE OF TRANSPORTATION*

**Winesthy Marizcha Anggraeny Alfons<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Tresjee Runtu<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia*

*Email : marizchaang@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Akuntansi Aset adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Akuntansi Aset memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem dan prosedur akuntansi aset adalah alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai atau digunakan SKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi aset pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Sebaiknya pimpinan Dinas Perhubungan Kota Manado meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur akuntansi aset dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga berdampak positif.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur, Akuntansi Aset, Analisis

### **ABSTRACT**

*The change of government system from centered to regional autonomy has given a big impact to government system and performance area. This influences management of financial system of government in region is well. Accountancy asset is one of important components to gain a good governance. Asset accountancy has system and procedure that have to meet the rule. Asset accountancy system and procedure is a controller in managing asset that is used by SKPD. The aim of this research is to know how the asset of accountancy system and procedure in the Manado City Office of Transportation is. The analysis method used here is descriptive analysis. The result of this research shows that accountancy asset of system and procedure is appropriate based on Permendagri No. 17 in 2007. It is suggested that the leader of Manado City Office of Transportation could increase and keep the accountancy asset of system and procedure and hold socialization and technical guidance in order to increase the quality of human resource and give positive impact.*

*Keyword : systems and procedures, asset accountancy, analysis*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk Laporan Keuangan, yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Pelaporan Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah.

Akuntansi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan, segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, aset takberwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Dinas Perhubungan adalah bagian dari sistem pemerintah daerah yang mana dalam penyelenggaraan pengelolaan daerah harus mendasarkan diri pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Maka penulis ingin menganalisis pelaksanaan prosedur akuntansi aset yang dilaksanakan pada kantor Dinas Perhubungan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi aset pada Dinas Perhubungan Kota Manado apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Akuntansi

Menurut American Accounting Association akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan ( Halim dan Kusufi, 2012)

#### Akunansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Halim (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas

pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan akuntansi sektor publik terbagi atas dua yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian Manajemen (*Management Control*). Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Akuntabilitas (*Accountability*). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

### **Peran Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mahmudi (2011) Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain : Pengelolaan keuangan Negara, Pelaporan keuangan, Pemeriksaan, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Dari keterangan tersebut di atas, diharapkan dengan adanya akuntansi pemerintah, mampu membangun hubungan kepercayaan yang baik antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat

### **Karakteristik Akuntansi Pemerintah**

Mardiasmo (2009) mengatakan karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah: “Karakteristik akuntansi pemerintahan disebabkan karena adanya lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan kompleks dan *turbulence*”.

### **Standar Akuntansi Sektor Publik**

#### **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kedudukan SAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Ruang lingkup SAP

diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dengan diterapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini, menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi dan Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

### **Langkah-langkah Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik**

Sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi mempunyai umur yang terbatas. Hal ini disebabkan karena kebutuhan informasi dalam suatu entitas akan berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi dari pihak-pihak berkepentingan (baik pihak eksternal maupun internal). Di samping itu juga, kemampuan teknologi, terutama alat-alat untuk memproses data, dapat juga mengakibatkan sistem akuntansi yang sekarang berlaku tidak lagi efisien. Dalam keadaan seperti ini, penyusunan kembali sistem akuntansi di organisasi perlu dilakukan. Langkah-langkah dalam penyusunan sistem ini (*system life cycle*) terdiri atas:

1. Analisis sistem yang ada. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem yang berlaku. Keunggulan dalam sistem ini terletak pada kemajuan teknologi yang dapat memproses data dan mengakibatkan sistem akuntansi yang sekarang berlaku, sedangkan kelemahan sistem ini terletak pada sistem akuntansi yang digunakan mempunyai umur yang terbatas. Pada praktiknya, analisis sistem ini dilakukan dengan mengadakan penelitian atau survey pendahuluan. Apabila pekerjaan penyusunan sistem ini dilakukan oleh pihak luar (konsultan), maka penelitian pendahuluan tersebut perlu dilakukan untuk;
2. Mengetahui ruang lingkup (cakupan) pekerjaan. Dengan mengetahui kelemahan dan keunggulan sistem yang ada, maka dapat diketahui pekerjaan yang diperlukan untuk menyusun sistem yang baru adalah:
  1. Merencanakan jangka waktu penyusunan sistem yang baru. Jangka waktu penyusunan sistem sangat bergantung pada luasnya pekerjaan penyusunan sistem.
  2. Menentukan jumlah biaya (fee) yang akan diminta sehubungan dengan pekerjaan penyusunan sistem.

## **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

## **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah paling sedikit mencakup, antara lain : Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan), Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal (kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah), Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah).

## **Pengertian Sistem dan Prosedur**

Menurut Diana dan Setiawati (2011) pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut “suatu sistem adalah serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan prosedur didefinisikan sebagai berikut “suatu uraian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang – ulang. Menurut Azhar Susanto (2013) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

## **Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

## **Landasan Empirik**

Veronika (2014) dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD di kabupaten SITARO. menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten SITARO pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.

Makagansa (2015) dengan judul Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. untuk mengetahui

dan mendeskripsikan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. menunjukkan Hasil penelitian menunjukan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik , namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik seperti masih terdapat aset yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi serta tidak dilakukannya pemanfaatan dalam bentuk apapun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Yanis (2015) dengan judul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007 Pada Dinas Pendidikan Kota Manado. Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi aset tetap berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 serta efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kota Manado menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan telah berjalan dengan baik, meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan aset. Sebaiknya sistem dan prosedur aset pada Dinas Pendidikan Kota Manado dilengkapi atau disempurnakan sesuai sistem dan prosedur yang ada didalam Permendagri No. 17 Tahun 2007.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Jenis data yang berbentuk deskriptif seperti gambaran umum organisasi, informasi operasional organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kuncoro (2009) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

### Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Manado dan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2016.

### Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang di angkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Perhubungan Kota Manado untuk menganalisis sistem dan prosedur akuntansi kas yang ada di Dinas Perhubungan.
3. Mengelolah data membandingkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset yang ada pada dinas perhubungan dengan peraturan yang berlaku dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

### **Metode Pengumpulan Data Jenis dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Indriantoro dan Supomo (2011) menyatakan bahwa jenis data terbagi dua, yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sistem penerimaan kas, dalam hal ini adalah pencatatan untuk penerimaan di Dinas Perhubungan Kota Manado.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa gambaran umum, visi, misi, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta data aset dan jumlah aset yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Manado

### **Metode Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan data kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan membandingkan penelitian dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan aset pemerintah dengan landasan teori yang ada. Adapun metode membandingkan antara metode pengukuran, pengakuan, pelaporan, pencatatan, pengungkapan apakah sudah sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara diadakan pembahasan masalah untuk menuju pada kesimpulan dan selanjutnya akan diberi saran-saran sebagai bahan input bagi pemerintah.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran. Penggunaan, penatausahaan, pemidahan-tanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

**Tabel 1. Kesimpulan Evaluasi Sistem dan Prosedur Aset Tetap/Barang Milik Daerah**

No	Sistem Dan Prosedur Penelolaan Aset Milik Daerah	Permendagri No 17 Tahun 2007	Dinas Perhubungan Kota Manado	Keterangan
1	Perencanaan	Meneliti dan menghimpun DKBMD	Telah direncanakan sesuai kebutuhan	Sesuai
2.	Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran	Melakukan inventaris dan pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran	Melakukan inventarisasi, pencatatan, penyimpanan dan penyaluran	Sesuai
3.	Penggunaan	Inventaris, pencatatan, digunakan untuk tugas pokok dan fungsi.	Inventarisasi, pencatatan. Masih terdapat aset yang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi.	Tidak Sesuai
4.	Penatausahaan	Melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan	Melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan	Sesuai
5.	Pemanfaatan	Pinjam pakai; Sewa; Kerjasama pemanfaatan; Bangun guna serah; Bangun serah guna.	Pinjam pakai; Sewa; Kerjasama pemanfaatan; Bangun guna serah; Bangun serah guna.	Sesuai
6.	Pengamanan dan Pemeliharaan	Pengamanan Administratif dan Pengamanan Fisik. Pemeliharaan tanpa merubah bentuk dan keindahan.	Pengamanan Administratif dan Pengamanan Fisik. Pemeliharaan ringan, sedang, dan berat.	Sesuai
7.	Penghapusan	Mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan	Mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan	Sesuai

*Sumber : Data Olahan, 2016*

### **Analisis Terhadap Perencanaan**

Sistem dan prosedur perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan perencanaan sesuai kebutuhan.

### **Analisis Terhadap Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**

Sistem dan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran pada sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Dinas Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unit-unit organisasi.

**Analisis Terhadap Penggunaan**

Sistem dan prosedur penggunaan belum sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena masih terdapat Aset/Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan.

**Analisis Terhadap Penatausahaan**

Sistem dan prosedur Penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan dan pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E.

**Analisis Terhadap Pemanfaatan**

Dalam pelaksanaan pemanfaatan aset daerah, Dinas Perhubungan melaksanakan tugasnya menginventarisasikan dan mencatat seluruh aset yang dimanfaatkan (pinjam pakai, penyewaan, bangun serah guna, bangun guna serah)

**Analisis Terhadap Pengamanan dan Pemeliharaan**

Sistem dan prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik serta melakukan beberapa bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang.

**Analisis Terhadap Penghapusan**

Sistem dan prosedur Penghapusan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengusulan terhadap aset daerah yang layak untuk dihapuskan dan melakukan pencatatan atas yang telah disetujui untuk dihapuskan.

## 4. PENUTUP

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan proses sistem dan prosedur akuntansi aset milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Manado secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.
2. Terdapat subsistem Pemanfaatan yang belum sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan Kota Manado tidak melakukan bentuk-bentuk pemanfaatan atas aset yang dimiliki.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset milik daerah secara efektif pada setiap subsistem sebaiknya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

2. Dinas Perhubungan Kota Manado dalam melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi aset agar melakukan bentuk-bentuk pemanfaatan atas aset yang dimiliki.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Jurnal**

- [1] Mulalinda, Veronika 2014 Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis danb Akuntansi *Vol 2, No 1* ISSN: 2303-1174
- [2] Makagansa, Evita Daufy Marcellya 2015 Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015
- [3] Yanis, Irene Sutri Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Sesuai Permendagri No.17 Tahun 2007 Pada Dinas Pendidikan Kota Manado Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Danb Akuntansi Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 162-170

#### **Buku**

- [4] Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- [5] Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi: Yogyakarta.
- [6] Halim Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Edisi ke 4 Jakarta. Salemba Empat.
- [7] Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta
- [8] Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- [9] Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- [10] Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Edisi 2. Yogyakarta.